

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM KONTEKS TRANSFORMASI DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN

Maulana Arba' Satryadin, Agus Heruanto Hadna, R. Ahmad Romadhoni Surya Putra
Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam layanan sektor publik, termasuk adopsi inovasi digital untuk mempermudah akses layanan di sektor publik. Dalam merespon perkembangan ini, Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan sertipikat tanah elektronik untuk publik melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang dilaksanakan secara bertahap mulai pertengahan tahun 2024. Kebijakan ini kemudian diprioritaskan terhadap 104 Kantor Pertanahan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, data atau dokumen lain yang relevan.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan pusat belum mempertimbangkan kondisi kesiapan data elektronik di setiap kantor pertanahan, model implementasi kebijakan yang bersifat *top down* seringkali tidak mempertimbangkan kondisi dan kesiapan data di lapangan, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Proses komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, namun kualitas dan kuantitas komunikasi masih perlu ditingkatkan agar informasi kebijakan sertipikat tanah elektronik diketahui seluruh lapisan masyarakat. Implementasi sertipikat tanah elektronik ini didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik SDM, anggaran, maupun peralatan, namun sumber daya utama berupa data pertanahan elektronik masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertipikat tanah elektronik diidentifikasi dalam analisis penelitian ini, antara lain faktor kepemimpinan, interoperabilitas, birokrasi, dan budaya digital.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, Sertipikat tanah elektronik, Transformasi digital sektor publik.*

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC LAND TITLE POLICY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION AT THE BINTAN DISTRICT LAND OFFICE

Maulana Arba' Satryadin, Agus Heruanto Hadna, R. Ahmad Romadhoni Surya Putra
Master of Leadership and Policy Innovation, Gadjah Mada University

ABSTRACT

The rapid development of technology and information has driven significant changes in public sector services, including the adoption of digital innovations to facilitate access to services in the public sector. In response to these developments, the Ministry of ATR/BPN established a policy of electronic land titles for the public through Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 3 of 2023 which was implemented in stages starting in mid-2024. This policy was then prioritized for 104 Land Offices, including the Bintan District Land Office through Ministerial Decree No. 285/SK-OT.01/III/2024.

The purpose of this study is to analyze the implementation of the electronic land title policy in the Bintan District Land Office and to identify factors influencing the implementation of electronic land titles. This research applies a qualitative approach using primary data obtained through interviews with informants and observation, and secondary data obtained from journals, other relevant data or documents.

The results of the study of the implementation of the electronic land title policy in the Bintan District Land Office show that the standards and objectives of the policy set by the center have not considered the condition of electronic data readiness in each land office, the top-down model of policy implementation often does not consider the condition and readiness of data in the field, so this is an obstacle in the implementation process. The communication process in delivering policy information is carried out through socialization to stakeholders, but the quality and quantity of communication still needs to be improved so that information on the electronic land title policy is known to all levels of society. Implementation of electronic land titles is supported by the availability of adequate resources, including human resources, budgets and equipment, but the main resource, electronic land data, still needs to be improved in quantity and quality. Furthermore, several factors affecting the implementation of electronic land title were identified in this research analysis, including leadership, interoperability, bureaucracy and digital culture.

Keywords: *Policy Implementation, Electronic land title, Digital transformation of the public sector.*